PASANG SURUT PERAN POLITIK MASYUMI DALAM PEMERINTAHAN (1945-1960)

Insan Fahmi Siregar
Jurusan Sejarah FIS - UNNES

Abstract

Masyumi Party (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia) was a major Islamic political party in Indonesia. It was originally established by the occupying Japanese in 1943 in an attempt to control Islam in Indonesia. In 1952, Nahdlatul Ulama seceded from Masyumi and create the new party, based on traditional society. The party came second in the 1955 election with 20.9% of the popular vote. During the period of liberal democracy era, Masyumi members had seats in parliament and the party supplied prime ministers such as Muhammad Natsir and Burhanuddin Harahap. The group's leaders campaigned for an Islamic state in the 1950's not out of a real conviction, but mainly from fear of being outflanked by the larger and more aggressive Masyumi. Under the dictatorships, the group withdrew from partisan politics, but with the restoration of democracy it formed a new party, National Awakening, open to all religions and committed to a secular state. In 1958, some Masyumi members joined the PRRI rebellion against Sukarno. Two years later in 1960, Sukarno banned Masyumi and Socialist Party, and sent Masyumi leaders to jail.

Key words: Masyumi Party, opposes, democracy, government

PENDAHULUAN

Partai Masyumi merupakan salah satu partai politik yang lahir dari rahim proklamasi kemerdekaan Indonesia. Partai Masyumi didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 melalui Muktamar Umat Islam di Gedung Muallimin Yogyakarta. Masyumi merupakan satu-satunya partai yang berazaskan Islam yang lahir pada awal kemerdekaan. Partai Masyumi didukung oleh organisasi-organisasi keagamaan yang sudah ada sebelumnya seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Banyaknya dukungan dari berbagai organisasi tersebut yang mengantarkan Masyumi berkembang dengan cepat.

Kehadiran Masyumi sebagai partai politik telah ikut mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Bahkan peran politik Masyumi sangat besar pengaruhnya terhadap perpolitikan Indonesia. Hal itu tidak terlalu mengherankan karena Masyumi merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Selain itu, Masyumi juga memiliki kader-kader yang cukup cerdas dan ahli dalam bidangnya, serta mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Kondisi seperti itulah yang mengatarkan Masyumi selalu terlibat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan kata lain, setiap akan membicarakan politik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin tidak akan sempurna tanpa melihat peran politik Masyumi.

Partai Masyumi telah memainkan perannya dalam setiap persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Ketika Indonesia masih dibawah bayang-bayang kembalinya penjajah untuk menguasai kembali Indonesia, Masyumi turut serta membendung dan melalukan perlawanan, baik melalui jalur perang sebagaimana yang diperjuangkan barisan Hizbullah sebagai *underbou*w Masyumi maupun melalui jalur diplomasi melalui tokoh-tokohnya seperti Moh. Roem. Begitu juga halnya ketika masyarakat menuntut untuk mengembalikan bentuk negara Indonesia ke dalam negara kesatuan, Masyumi juga berperan aktif untuk memperjuangkannya, sebagaimana yang diperankan M. Natsir melalui mosinya untuk mengganti Negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun1950.

Disamping itu, Masyumi juga berperan aktif dalam parlemen dan konstituante, terutama pada masa demokrasi parlementer. Namun, dalam tulisan ini pembahasan peran politik Masyumi hanya difokuskan pada peranannya dalam pemerintahan, mulai dari masa awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi parlementer.

MASYUMI SEBAGAI PARTAI KRITIS TERHADAP PEMERINTAH PADA MASA REVOLUSI

Seminggu setelah Masyumi didirikan atau tepatnya pada tanggal 14 Nopember 1945 Kabinet Syahrir dilantik. Kabinet Syahrir merupakan kabinet pertama di Indonesia dalam sistem pemerintahan parlementer. Ketika Syahrir membentuk kabinetnya yang pertama, Partai Masyumi tidak diikutkan duduk dalam pemerintahan. Meskipun dalam kabinet Syahrir terdapat nama M. Rasyidi sebagai menteri negara, tetapi keberadaaanya sebagai menteri atas nama pribadi, dan bukan mewakili Partai Masyumi. Sekalipun demikian, terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 tidak lepas dari peran politik yang dijalankan Masyumi, dan yang menjadi menterinya adalah M. Rasyidi (Noer, 153-154).

Masyumi bersikap kritis terhadap Kabinet Syahrir, dan tidak jarang bertentangan dengan pemerintah, seperti dalam menyikapi permasalahan imperialis. Partai Masyumi tidak setuju dengan sikap pemerintah yang lebih mengedepankan perundingan dalam menghadapi Belanda. Sikap itulah yang membuat Masyumi bersikap oposisi. Bahkan Masyumi menuntut Syahrir untuk mengembalikan mandatnya kepada presiden, dan tuntutan itupun dipenuhinya. Namun, Presiden Sukarno menujuk kembali Syahrir untuk membentuk kabinet baru.

Kabinet yang dibentuk dalam Kabinet Syahrir II terdapat kader-kader Masyumi, seperti Arudji Kartawinata sebagai menteri muda pertahanan, M. Natsir sebagai menteri penerangan, Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai menteri muda keuangan, dan M. Rasyidi sebagai menteri agama. Begitu juga halnya dengan Kabinet Syahrir III, kader-kader Masyumi masih tetap menduduki beberapa jabatan menteri seperti Mr. Moh. Roem sebagai menteri dalam negeri, Harsono Tjokroaminoto sebagai menteri muda pertahanan, M. Natsir sebagai menteri penerangan, Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai menteri keuangan, Yusuf Wibisono sebagai menteri muda kemakmuran, K.H. Faturahman sebagai menteri agama, dan K.H. Wahid Hasyim sebagai menteri negara. Meskipun ada kader Masyumi yang duduk dalam kabinet, Partai Masyumi tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Bahkan sikap Masyumi semakin keras, terutama setelah adanya Persetujuan Linggarjati.

Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh Sutan Syahrir dari pihak Indonesia, dan Schermerhorn dari pihak Belanda. Persetujuan Linggarjati tidak hanya ditentang oleh orang Belanda di Belanda, tetapi juga oleh sebagian masyarakat Indonesia (Lapian, 1992: 4). Partai Masyumi sendiri menolak Persetujuan Linggarjati karena merugikan kedaulatan Republik Indonesia, dimana Belanda hanya mengakui kekuasaan *de facto* RI atas Jawa, Madura dan Sumatera. Padahal sikap politik Masyumi jelas, yakni menuntut Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia seratus persen. Meskipun menolak Linggarjati, Masyumi tidak akan berdiam diri, dan akan membantu pemerintah jika timbul akibat dari persetujuan itu (Nasution, 1978: 38).

Sikap kritis Masyumi terhadap pemerintah terus berlanjut hingga masa Kabinet Amir Syarifuddin I. Pada masa kabinet Amir Syarifuddin, tidak ada satu pun kader Masyumi yang duduk dalam kabinet. Kader Masyumi baru duduk kembali dalam kabinet Amir Syarifuddin II. Namun pada tanggal 22 Januari 1948 Partai Masyumi menarik kadernya yang duduk dalam kabinet. Sikap itu diambil sebagai reaksi terhadap Perjanjian Renville yang ditandatangani Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Masyumi menolak perjanjian tersebut karena lebih menguntungkan Belanda. Sikap Masyumi tidak hanya menarik kadernya dari kabinet, tetapi juga melakukan demonstrasi dengan tuntutan pembubaran Kabinet Amir Syarifuddin. Akibatnya Kabinet Amir Syarifuddin *pun* jatuh.

Setelah kabinet Amir jatuh, Sukarno menunjuk M. Hatta sebagai perdana menteri. Pada masa kabinet Hatta, beberapa kader Masyumi duduk kembali dalam pemerintahan. Diantaranya adalah Sukiman sebagai menteri dalam negeri, Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai menteri penerangan, dan K.H. Masykur sebagai menteri agama.

Ketika kabinet Hatta menjalankan pemerintahannya, meletus pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan itu dapat ditumpas dengan mengirim pasukan Siliwangi dan dibantu oleh umat Islam. Belum lama menghadapi musuh dari dalam, tiba-tiba Belanda melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Agresi itu mengakibatkan ditawannya beberapa pemimpin Indonesia, seperti Presiden Sukarno dan Wakil Presiden M. Hatta. Ketika pemimpin nasional ditawan Belanda, Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tingggi pada 22 Desember 1948. Pembentukan PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia tetap ada. Adapun yang menjadi ketua adalah Syafrudin Prawiranegara (Soerjomiharjdjo, 1990: 44). Syafrudin adalah orang pertama dari Masyumi yang menduduki posisi puncak pemerintahan.

Ketika Syafrudin menjalankan roda pemerintahan PDRI, Mr. M. Roem mengadakan perundingan dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Van Royen. Perundingan itu menghasilkan *Van Royen-Roem Statements* (Pernyataan Van Royen-

Roem) pada tanggal 7 Mei 1949. *Statement* itu berisi pengembalian pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Selain itu akan diadakan Konferansi Meja Bundar (KMB) yang membahas proses penyerahan kedaulatan yang benar-benar dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (Roem, 1977:43-50).

Berdasarkan pernyataan itu maka diadakanlah KMB di Denhaag. Konferensi itu menghasilkan keputusan untuk memberikan kedaulatan kepada RIS. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 (Roem, 1972:116-117). Seiring dengan pengakuan itu, berakhirlah periode revolusi dalam sejarah Indonesia. Setelah adanya pengakuan tersebut, dan kembalinya Indonesia sebagai NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat itu Indonesia memasuki masa Demokrasi parlementer.

MASYUMI SEBAGAI PARTAI PEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

Meskipun Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia, namun bagi sebagian masyarakat belum puas karena Negara Indonesia masih bersifat serikat. Melihat kenyataan itu, M. Natsir sebagai ketua Fraksi Masyumi di parlemen mengajukan mosi tentang pendirian Negara Kesatuan RI. Mosi Natsir diterima parlemen secara aklamasi. Dengan demikian, Negara Indonesia menjadi NKRI yang diproklamasikan kembali secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 (Puar, 1978: 95-101).

Keberhasilan Mosi Natsir itu menambah simpati dari berbagai kalangan, termasuk dari Presiden Sukarno. Presiden Sukarno kemudian menunjuk Natsir untuk membentuk kabinet. Natsir berhasil membentuk kabinet, tanpa mengikutsertakan PNI dan PKI. Kabinet Natsir terdiri dari Perdana Menteri M. Natsir dan dibantu Wakil PM Sultan Hamengkubuwono IX serta beberapa menteri dari Masyumi seperti M. Roem sebagai menteri luar negeri, Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai menteri keuangan, dan K.H. Wahid Hasyim sebagai menteri agama. Kabinet Natsir dilantik pada 6 September 1960 (Feith, 1973: 150). Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi NKRI. Jadi peranan Masyumi dalam pemerintahan sangat besar pada masa awal Demokrasi parlementer.

Kabinet Natsir tidak bertahan lama, karena adanya tekanan dari kalangan oposisi. Menurut Yusuf Wibisono ada dua alasan mengapa Natsir mengembalikan mandatnya. *Pertama*, mosi Hadikusumo. *Kedua*, kegagalan konferensi Irian Barat (Noer, 1987: 213). Kegagalan konferensi Irian Barat berakibat kurang baiknya hubungan antara Perdana Menteri M. Natsir dengan Presiden Sukarno.

Ketidakharmonisan M. Natsir dengan Presiden Sukarno terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi Irian Barat. M. Natsir menghendaki penyelesaian masalah tersebut melalui jalur diplomasi, sementara Sukarno mendesak agar mengambil tindakan terhadap Belanda, bahkan dengan mengatakan akan memulai tindakan itu melalui pidato-pidatonya. Natsir menanggapi pernyataan Sukarno tersebut dengan mengatakan bahwa kabinetlah yang merancang dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, Natsir juga mengingatkan presiden bahwa beliau adalah hanya kepala negara dalam sistem parlementer. Pernyataan itu merupakan pukulan telak terhadap Sukarno. Pukulan itu semakin terasa ketika dalam sidang kabinet diadakan pemungutan suara, mayoritas anggota kabinet mendukung pendapatnya Natsir (Faith, 1973: 163). Peristiwa itu merupakan catatan tersendiri bagi Sukarno, sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa peristiwa itu menumbuhkan benih-benih kebencian Sukarno terhadap Natsir. Dampak dari perseteruan itu yang kemudian menyebabkan Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 2 Maret 1950.

Setelah Natsir mengembalikan mandatnya, kedudukan perdana menteri kemudian dijabat oleh Sukiman dari Masyumi. Jadi, Sukiman merupakan orang kedua dari Masyumi yang duduk di puncak pemerintahan pada masa demokarasi parlementer. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi, terutama antara Masyumi dengan PNI. Kader Masyumi yang duduk dalam kabinet adalah Mr. Achmad Subarjo sebagai menteri luar negeri, Mr. Yusuf Wibisono sebagai menteri keuangan, Dr. Syamsudin sebagai menteri sosial, dan K.H. Wahid Hasyim sebagai menteri agama. Kabinet Sukiman dilantik pada tanggal 27 April 1951 (Feith, 1973: 180).

Program kabinet Sukiman tidak jauh berbeda dengan Kabinet Natsir. Meskipun demikian, ada dua hal yang perlu diperhatikan pada masa Kabinet Sukiman. *Pertama*, melakukan razia dan pengisolasian terhadap PKI. *Kedua*, menerima bantuan militer dari Amerika melalui *Mutual Security Act* (MSA). Sebagian kalangan melihat kebijakan tersebut keluar dari politik luar negeri yang bebas aktif. Kebijaksanaan yang terakhir inilah yang menjadi salah satu sebab jatuhnya kabinet Sukiman. Akhirnya Sukiman menyerahkan mandatnya kepada presiden pada 23 Februari 1952 (Noer, 1987: 219-220). Kabinet Sukiman digantikan oleh kabinet Wilopo.

Kabinet Wilopo diumumkan pada 30 Maret 1952. Pada kabinet Wilopo masih juga terdapat kader-kader Masyumi seperti Prawoto Mangkusasmito sebagai wakil perdana menteri, Mr. M. Roem sebagai menteri luar negeri, Moh. Sarjan sebagai menteri pertanian, dan K.H. Faqih Usman sebagai menteri agama (Feith, 1973: 228-229).

Pada masa Kabinet Wilopo terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952. Munculnya peristiwa itu berawal dari konflik inernal TNI AD. Konflik itu berembes ke parlemen. Parlemen membahas masalah itu yang kemudian melahirkan mosi Manai Sophian. Manai Sophian mengusulkan supaya diadakan reorganisasi dan mutasi di lingkungan Angkatan Perang dan kementerian pertahanan. Mosi itu diterima parlemen. Tentara menilai parlemen terlampau jauh mencampuri intern tentara. Tentara menolak mosi itu dengan melakukan tekanan kepada presiden untuk membubarkan parlemen. Tuntutan itu ditolak presiden. Menurut A.H. Nasution peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan setengah *coup*, karena hanya ditujukan kepada parlemen, dan tidak kepada pemerintah atau presiden (Nasution, 1984: 147-175; Sophian, 1991:

326-327).

Peristiwa itu semakin menambah kesemrawutan politik Indonesia, karena sebagian politisi merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan itu secara tuntas. Terlepas dari masalah tersebut, menurut Wilopo bahwa kabinetnya jatuh karena adanya perbedaan sikap antara Masyumi dan PNI mengenai pembukaan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, dan peristiwa Tanjung Morawa. Akhirnya Wilopo menyerahkan kembali mandatnya pada 2 Juni 1953 (Wilopo, 1978: 32-34).

Setelah kabinet Wilopo berakhir, ada keinginan sebagian politisi untuk membentuk kabinet presidensial. Namun sebagian lain menolak karena bertentangan dengan UUDS 1950. Meskipun ada pro kontra terhadap sistem pemerintahan yang berlaku saat itu, Presiden Sukarno tetap melanjutkan tradisi dengan menunjuk M. Roem (Masyumi) dan S. Mangunsarkoro sebagai formatur kabinet. Namun formatur ini gagal membentuk kebinet. Begitu juga halnya dengan Mukarto Notowidigdo (PNI) dan Burhanudin Harahap (Masyumi). Kabinet baru berhasil dibentuk setelah Wongsonegoro (PIR) ditunjuk sebagai formatur. Wongsonegoro berhasil membentuk kabinet Ali Sastroamijoyo (PNI). Dalam kabinet Ali I, Masyumi tidak ikut dalam pemerintahan, sehingga Masyumi bertindak sebagai partai oposisi. Selama masa demokrasi parlementer, pada masa kabinet Ali I inilah Masyumi tidak ikut dalam pemerintahan.

Kabinet Ali tidak bertahan lama, yang kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan PSII, NU, PSI, dan Parkindo. Kader Masyumi yang duduk dalam kabinet adalah Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri dan sekaligus menteri pertahanan, Moh. Sarjan sebagai menteri pertanian, dan Abdul Halim sebagai menteri negara. Meskipun kabinet ini tidak bertahan lama, tetapi pemerintah berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia.

Pemilu dilaksanakan dari tanggal 29 September sampai dengan 15 Desember 1955. Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Partai Masyumi menjadi partai kedua terbesar setelah PNI dengan posisi PNI dan Masyumi masing-masing memperoleh 57 kursi DPR, dan dalam kontituante PNI memperoleh 119 kursi, dan Masyumi 112 kursi (Busyairi, 1985: 211-213). Kedudukan Masyumi seperti itu yang mengantarkan Masyumi menjadi partai yang sangat berperan penting dalam setiap pembicaraan yang muncul di DPR dan Konstituante.

Setelah Pemilu usai dan berhasil memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR dan Konstituante, maka Burhanuddin menyerahkan kembali mandatnya pada 3 Maret 1956. Pada 8 Maret 1956, Presiden Sukarno menujuk Ali Sastroamijoyo untuk membentuk kabinet. Setelah melakukan *hearing* dengan partai-partai lain, kemudian Ali berhasil membentuk kabinet koalisi, terutama antara PNI, Masyumi dan NU. Pimpinan kabinetnya adalah Ali Sastroamijoyo (PNI) sebagai perdana menteri, M. Roem (Masyumi) sebagai wakil perdana menteri I, dan K.H. Idaham Khalid (NU) sebagai waperdam II. Adapun wakil Masyumi dalam kabinet Ali II adalah Mr. Yusuf Wibisono sebagai menteri keuangan, Prof. Dr. Mulyatmo sebagai menteri kehakiman, Suchyar Tejakusuma sebagai menteri perhubungan, dan Ir. Pangeran Moch. Noer sebagai menteri pekerjaan umum dan tenaga. Susunan kabinet itu dilaporkan kepada Presiden Sukarno.

Ketika Sukarno melihat susunan kabinet itu, beliau kecewa karena tidak mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Bahkan Sukarno marah dengan menyatakan ini tidak adil. Meskipun demikian, setelah seminggu susunan kabinet itu ada di tangan Sukarno, akhirnya dengan berat hati Sukarno menyetujui susunan kabinet tersebut. Kabinet Ali II *pun* dilantik pada 24 Maret 1956 (Sastroamidjojo, 1974: 342-346).

Kabinet Ali II menghadapi persoalan yang cukup rumit, terutama dengan adanya konflik internal dalam tentara. Konflik itu semakin keras dengan munculnya dewan-dewan daerah yang pada gilirannya menimbulkan pergolakan-pergolakan di daerah. PM Ali tidak cukup berhasil mengatasi keadaan. Ketidakberhasilan itu tidak lepas dari peran Sukarno yang mulai mencampuri urusan pemerintah. Atau paling tidak Presiden Sukarno justru semakin memperkeruh keadaan, sehingga suhu politik semakin memanas.

Melihat kondisi seperti itu, dalam Muktamar Masyumi pada 27 Desember 1956 mengambil keputusan untuk menarik para menterinya dari kabinet. Keputusan itu kemudian diumumkan pimpinan Masyumi pada tanggal 9 Januari 1957. Alasan Masyumi menarik menterinya dari kabinet karena Masyumi tidak mau bertanggungjawab atas politik penyelesaian peristiwa-peristiwa di Sumatera. Hal ini disampaikan Sukiman di Parlemen pada 21 Januari 1957 (Sastroamidjojo, 1974: 366-367). Setelah Masyumi keluar dari kabinet, maka berakhirlah peranan Masyumi dalam pemerintahan. Sejak saat itu, Masyumi tidak pernah lagi terlibat langsung dalam pemerintahan sampai pada masa demokrasi terpimpin.

MASYUMI SEBAGAI PARTAI OPOSISI PADA MASA TRANSISI MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN

Setelah Masyumi keluar dari kabinet Ali II, Masyumi mulai memposisikan diri sebagai partai oposisi terhadap pemerintah. Sebagai partai oposisi tentunya Masyumi mengawasi jalannya pemerintahan. Masyumi mengkritik kebijakan pemerintah dalam menyikapi peristiwa-peristiwa militer di Sumatera. Adanya tekanan dari berbagai pihak kepada pemerintah, membawa dampak bagi kabinet, sehingga posisi pemerintah pun semakin lemah. Hal itu terbukti dalam jangka dua bulan setelah keluarnya Masyumi dari kabinet, kabinet Ali II berakhir. Jatuhnya kabinet Ali II menandakan berakhirnya sistem parlementer, dan memasuki masa transisi yakni dari masa demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin.

Sikap oposisi Masyumi semakin menguat setelah Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet pada 4 April 1957. Formatur kabinet bertugas untuk membentuk *Zaken Kabinet Darurat Extra Parlementer* dan Dewan Nasional. *Zaken* *kabinet* merupakan kabinet yang formasinya tidak menitikberatkan pada kekuatan politik pada parlemen, tetapi berdasarkan keahlian dan kecakapan menteri. Sukarno berhasil membentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda. Dalam kabinet karya terdapat dua menteri yang berasal dari Masyumi yakni Ir. Pangeran M. Noer dan Mulyadi Joyomartono. Meskipun terdapat anggota Masyumi dalam kabinet, Partai Masyumi menolak kabinet dengan meminta para kadernya untuk mengundurkan diri dari kabinet karya. Namun, kedua kader itu tetap bertahan dalam kabinet, akibatnya mereka dikeluarkan dari keanggotaan Masyumi. Masyumi menentang pembentukan kebinet karya disebabkan pembentukan *zaken kabinet* adalah suatu pelanggaran, karena melanggar UUDS yang masih berlaku, dan tata tertib ketatanegaraan dan norma-norma demokrasi. Bahkan Masyumi menilai Sukarno sudah menganggap sepi kedaulatan rakyat dan sengaja mengaburkan pengertian demokrasi yang sudah dikenal selama ini (Busyairi, 1985: 242-245).

Partai Masyumi tetap konsisten terhadap pendiriannya, yakni menolak konsepsi presiden yang menjadi landasan pembentukan kabinet karya. Ketika kabinet karya menyampaikan program kerjanya ke DPR misalnya, Fraksi Masyumi melalui juru bicaranya Mr. Burhanuddin Harahap menilai prosedur pembentukan kabinet tidak proporsional dan masih simpang siur. Selanjutnya beliau mengatakan " Bagaimanapun baiknya program dan niat pemerintah, ia tidaklah dapat dilaksanakan, apabila norma-norma yang dipakai oleh berbagai instansi pelaksanaannya telah dan sedang simpang siur …". Penilaian serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Masyumi Burhanuddin Harahap dalam menilai pembentukan Dewan Nasional. Lebih lanjut beliau mengatakan "adanya Dewan Nasional adalah bertentangan dengan UUD yang berlaku. Sebab adanya suatu lembaga negara telah diatur sedemikan rupa dalam UUD". Oleh karena itu, Fraksi Masyumi menolak konsepsi presiden, baik materi dan pelaksanaannya maupun alasan-alasannya (Busyairi, 1985: 133-134). Sikap fraksi ini menunjukkan bahwa Masyumi tidak mau berkompromi dengan kebijaksanaan Sukarno dalam pembentukan kabinet karya. Masyumi tidak hanya menolak konsepsi presiden, tetapi juga menolak demokrasi terpimpin.

Partai Masyumi terus mencurigai pelaksanaan demokrasi terpimpin, mengingat sikap Sukarno yang membentuk kabinet karya yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD yang masih berlaku. Memasuki masa demokrasi terpimpin, Partai Masyumi tetap bersikap oposisi terhadap pemerintah. Ketika pemerintah mengajukan RAPBN di DPR, Fraksi Masyumi menolaknya, sehingga DPR juga menolaknya. Penolakan DPR terhadap RAPBN tersebut yang menyebabkan DPR dibubarkan Presiden Sukarno pada tahun 1960.

Setelah DPR dibubarkan, maka praktis peran politik Masyumi secara legal formal sudah habis dalam rangka melakukan oposisi terhadap pemerintah. Sekali pun demikian, Masyumi tetap melakukan aksi oposisi terhadap pemerintah melalui ekstra parlementer dengan membentuk

Liga Demokrasi. Namun lembaga ini juga dibubarkan pemerintah, sehingga hampir tidak ada ruang lagi bagi Masyumi melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah. Gerakan oposisi berakhir sudah setelah Partai Masyumi sendiri dipaksa dibubarkan Sukarno pada 17 Agustus 1960. Itulah satu konsekuensi logis yang sangat pahit yang harus ditelan oleh Partai Masyumi, karena terlalu *istiqomah* terhadap pendiriannya yang tidak mau berkompromi dengan sikap politik pemerintahan Sukarno pada masa demokrasi terpimpin.

PENUTUP

Peranan Masyumi dalam pemerintahan mengalami pasang surut. Adakalanya Masyumi berada dalam pemerintahan, dan bahkan menjadi kepala pemerintahan. Secara umum Partai Masyumi pada masa revolusi menempatkan partainya sebagai partai kritis terhadap pemerintah, sekalipun para kadernya duduk dalam pemerintahan. Dengan kata lain, sekalipun kader Masyumi ada yang menjadi menteri, tetapi Partai Masyumi tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dan bahkan sangat kritis terhadap pemerintah sehingga tidak heran kalau kabinet jatuh karena begitu besarnya peran politik yang dimainkan Masyumi pada masa revolusi.

Pada masa demokrasi parlementer, Partai Masyumi menempatkan dirinya sebagai partai pemerintah. Bahkan berhasil menempatkan para kadernya pada puncuk pimpinan pemerintah seperti M. Natsir, Sukiman dan Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri. Sementara itu, Prawoto Mungunkasmito dan M. Roem sebagai wakil perdana menteri. Disamping itu, masih terdapat beberapa menteri yang duduk dalam pemerintahan.

Peranan Masyumi dalam pemerintahan berkurang sama sekali ketika memasuki masa transisi. Akibatnya Masyumi pada periode ini menempatkan dirinya sebagai partai oposisi. Sikap oposisi itu terus berlanjut pada pada masa demokrasi terpimpin. Konsekuensi dari sikap oposisi itu yang mengantarkan Partai Masyumi dibubarkan Presiden Sukarno pada bulan Agustus 1960. Seiring dengan itu, secara legal formal peran politik Masyumi berakhir.

DAFTAR RUJUKAN

Busyairi, Badruzzaman. 1985. *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Feith, Herbert. 1973. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Lapian, A.B. dan P.J. Drooglever (peny). 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Grafiti.

Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 5.* Bandung: Angkasa.

______ 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 3*. Jakarta; Gunung Agung.